

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Pelayanan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

Pelayanan adalah proses melakukan suatu kegiatan tertentu dengan perantara orang sebagai tenaga kerjanya, proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi, proses pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.⁷³ Pelayanan keuangan desa adalah suatu kegiatan yang didalamnya meliputi pelaksanaan, perencanaan, penatausahaan, laporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.⁷⁴ Pelayanan keuangan desa adalah salah satu proses yang sangat penting karena kegiatan ini mengurus keluar dan masuknya dana desa. Mengetahui akan pentingnya proses ini, sistem pelayanan desa di Desa Pojok yang mulanya masih menggunakan sistem yang lama, pada awal tahun 2017 sistem lama yang masih manual diganti ke aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes).

Aplikasi sistem keuangan Desa (Siskeudes) adalah aplikasi yang dibuat oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) guna membantu

⁷³Nirwana Ahmad, "Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang", *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), hlm. 15

⁷⁴ Nyoman Sunarti, dkk. "Pengelolaan keuangan desa dan sistem akuntansi keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah desa pacung", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*: (Bali: Universitas Pendidikan Ganesha, 2018) vol.8 no.1, hlm. 13

dan mempermudah pemerintah Desa dalam melakukan pelaporan keuangan Desa.⁷⁵

Hal serupa juga sejalan dengan pertanyaan peneliti dengan aplikasi siskeudes, kemudian Bapak Maskur Arifin mengatakan bahwa:

Aplikasi ini bertujuan untuk mengakomodir sistem keuangan desa yang sesuai dengan KEMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 yang diperbaharui oleh KEMENDAGRI No. 20 Tahun 2018. Kemudian aplikasi ini dikembangkan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) kemudian diakui oleh Kemendagri, jadi aplikasi siskeudes ini merupakan aplikasi resmi yang bisa digunakan oleh desa.⁷⁶

Hal demikian juga sesuai dengan pemaparan Ibu Lailatul As'adah selaku operator aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) bahwa:

Sistem keuangan desa (Siskeudes) adalah aplikasi pengelola keuangan desa yang bersinergi dengan dinas pemberdayaan masyarakat desa untuk memudahkan dalam pelayanan keuangan desa mulai dari perencanaan sampai pelaporan.⁷⁷

Dari uraian yang disampaikan oleh Ibu Lailatul As'adah tersebut sama halnya yang disampaikan oleh Bapak Sunarto selaku Bendahara Desa, ia mengungkapkan bahwa:

Aplikasi siskeudes ini merupakan aplikasi keuangan untuk memudahkan pihak desa dalam mengurus tatanan pengelolaan keuangan pemerintahan desa, sehingga untuk masalah administrasi keuangan desa menjadi lebih mudah. Untuk aplikasi ini juga sudah diterapkan dalam KEMENDAGRI 113 Tahun 2014.⁷⁸

⁷⁵ Jehan M. Mahalika, Herman Karamoy, Rudy J. Pusung, "Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa", *Jurnal Riset Akuntansi*, (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2018), Vol.13 No.04, hlm . 12

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Maskur Arifin Selaku Kasi Pengelolaan Keuangan Desa DPMD, Pada hari Jumat, 11 Juni 2021, Pukul 10.30 WIB

⁷⁷ Hasil Wawancaradengan Ibu Lilatul As'adahSelaku Operator Desa Pojok, Pada hari Jumat, 11 Juni 2021, Pukul 09.00 WIB

⁷⁸ Hasil Wawancaradengan Bapak Sunarto Selaku Bendahara Desa Pojok, Pada hari Jumat, 11 Juni 2021, Pukul 09.00 WIB

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa aplikasi siskeudes merupakan aplikasi penunjang untuk memudahkan perangkat desa dalam menjalankan tatanan pemerintahan desa khususnya dalam tahapan pelaporan keuangan desa. Selain itu dalam aplikasikasi tersebut terdapat tahapan-tahapan dalam sistem pengelolaannya, hal demikian sejalan dengan pertanyaan peneliti terkait dengan tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi siskeudes, Bapak Maskur Arifin mengatakan bahwa:

Tahapan pelaporan itu kurang luas tapi lebih tepatnya tahapan pengelolaan keuangan desa yaitu meliputi perencanaan yang dimana meliputi pedoman RPJNDes yang merupakan visi misi kades selama masa jabatan 6 tahun, kemudian di perinci untuk perencanaan pembangunan untuk setiap tahunnya berupa RKPDes. Kemudian setelah perancangan yaitu tahap penganggaran, dalam penganggaran tersebut akan menciptakan APBDes, setelah APBDes telah terverifikasi oleh pemerintah daerah melalui camat dan disetujui oleh BPD maka APBDes yang telah disetujui maka dapat dibelanjakan. Tahap selanjutnya adalah penata usahaan, pada tahapan ini merupakan tahapan untuk mencatat dan membukukan dari APBDes tersebut jadi yang dapat dibelanjakan yang ada di APBDes dan selain itu tidak bisa. Tahapan teraakhir adalah pembukuan, pada tahapan ini semua transaksi mulai dari tahapan perencanaan sampai penata usahaan semua dicatat dalam bentuk pelaporan.⁷⁹

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Ibu Lailatul As'adah, ia mengatakan bahwa: "kalau tahapan dalam aplikasi siskeudes ini mulai dari perencanaan, kemudian penganggaran, penatausahaan, dan yang terakhir adalah pembukuan."⁸⁰ Dari yang disampaikan oleh Ibu Laila tersebut juga disampaikan oleh Bapak Sunarto, Ia mengatakan bahwa:

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Maskur Arifin Selaku Kasi Pengelolaan Keuangan Desa DPMD, Pada hari Jumat, 11 Juni 2021, Pukul 10.30 WIB

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Lilatul As'adahSelaku Operator Desa Pojok, Pada hari Jumat, 11 Juni 2021, Pukul 09.00 WIB

Untuk tahapan dalam pengoperasian aplikasi siskeudes ini mulai dari perencanaan pada tahapan ini merupakan tahapan rencana kegiatan selama satu tahun mendatang, selanjutnya penganggaran dimana mengkalkulasikan berapa anggaran dana yang dibutuhkan selama satu tahun mendatang, setelah itu penatausahaan yaitu pembukuan dan pencatatan dari APBDes yang telah disetujui, yang terakhir adalah pembukuan dimana mencatat semua transaksi yang telah dilakukan sebagai laporan dalam kegiatan dalam satu tahun.⁸¹

Dari pernyataan informan di atas dapat diketahui bahwa tahapan dalam pelaporan APBDes adalah mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan. Kemudian peneliti juga apakah aplikasi siskeudes dapat diakses layaknya aplikasi web desa, kemudian Bapak Maskur Arifin menjabarkan bahwa:

Kalau aplikasi ini tidak semua orang bisa mengoperasikannya, jadi yang dapat mengoperasikan aplikasi ini hanya operator saja, dan orang yang al tersebut yakni dari pihak kecamatan yang diberi tanggungjawab mendampingi desa dalam mengoperasikannya.⁸²

Ibu Lailatul As'adah selaku operator sistem keuangan desa (Siskeudes) menambahkan bahwa:

Untuk aplikasi ini memang ada pembatasan dalam akses. Hanya pihak tertentu atau pemerintah desa saja yang dapat mengakses aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Tujuannya agar menghindari tindakan tidak bertanggung jawab seseorang seperti meretas sistem dengan mengganti catatan penting yang dapat merugikan. untuk sarana pemaparan hasilnya sudah dipasang pada papan reklame.⁸³

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sunarto Selaku Bendahara Desa Pojok, Pada hari Jumat, 11 Juni 2021, Pukul 09.00 WIB

⁸² Hasil Wawancara dengan Bapak Maskur Arifin Selaku Kasi Pengelolaan Keuangan Desa DPMD, Pada hari Jumat, 11 Juni 2021, Pukul 10.30 WIB

⁸³ Hasil Wawancara dengan Ibu Lilatul As'adah Selaku Operator Desa Pojok, Pada hari Jumat, 11 Juni 2021, Pukul 09.00 WIB

Selain Ibu Laila, hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Sunarto ia mengatakan bahwa:

Kalau aplikasi ini tidak semua orang bisa mengaksesnya yang dapat mengakses aplikasi tersebut hanya pihak operator desa yang dapat mengakses dan menjalankan aplikasi tersebut. Selain itu aplikasi tersebut tidak bisa dibuka di dua perangkat sekaligus, jadi kalau misalkan ganti perangkat komputer maka aplikasi di perangkat sebelumnya harus dimatikan.⁸⁴

Dalam pengoperasiannya, aplikasi tersebut tidak dapat diakses oleh semua orang, hanya beberapa orang saja yang dapat mengakses yaitu bendahara dan operator aplikasi. Tujuan dari pembatasan akses ini antara lain untuk menghindari perilaku penyalahgunaan mengingat bahwa pelayanan keuangan desa merupakan hal yang cukup sensitif. Oleh karena itu pemerintah membatasi pengguna aplikasi tersebut agar pemerintah desa saja yang menangani pelayanan keuangan desa.

Dalam memberikan pelayanan keuangan tersebut tentu ada perbedaan antara sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi siskeudes, sebagaimana yang telah ditanyakan oleh peneliti terkait pelayanan keuangan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi siskeudes di Desa Pojo Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Maskur Arifin, ia mengatakan bahwa:

Sebelum adanya aplikasi siskeudes, Pada tahun 2015 sebelum adanya aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes), dan sebelum terbitnya peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 20 tahun 2018 pemerintah desa masih memakai peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 113 tahun 2014. Bentuk laporan keuangan desa sebelum adanya aplikasi sistem keuangan desa

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Sunarto selaku Bendahara Desa Pojo, Pada hari Jumat, 11 Juni 2021, Pukul 09.00 WIB

(Siskeudes) adalah masih manual. Semua pencatatan dilakukan secara satu persatu kemudian dijadikan satu kedalam suatu buku besar atau jurnal. Setiap kali desa melakukan kegiatan belanja akan dicatat dan dimasukan pada buku kas pengeluaran pembantu (BKPP). Selanjutnya semua yang dicatat pada buku kas pengeluaran pembantu (BKPP) akan dijadikan satu pada buku kas umum (BKU). Dalam buku tersebut sumber dana seperti ADD, DD, PAD, dan sumber dana lainnya akan masuk semua daftar belanjannya pada buku kas umum (BKU) tersebut. Selanjutnya pada buku kas umum (BKU) desa harus membuat laporan realisasi pertanggung jawaban, realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES), dan realisasi persumber dana desa. Apabila semua hal tersebut dilakukan desa secara manual akan memerlukan waktu yang lama.⁸⁵

Berkaitan dengan perbandingan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi siskeudes hal demikian juga disampaikan oleh Ibu Laila, ia mengatakan bahwa:

Sebelum adanya aplikasi siskeudes ini dulu dikerjakan secara manual jadi kalau mendata keuangan itu harus membuat satu-satu dan harus mencetak satu-satu juga. Rumit pokoknya, akan tetapi setelah adanya aplikasi ini segala sesuatu menjadi lebih mudah semuanya sudah ada dalam aplikasi tersebut.⁸⁶

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Laila, hal demikian juga disampaikan oleh Bapak Sunarto yang mengatakan bahwa: “Kalau sebelumnya harus mendata satu-satu tapi kalau sekarang sudah enak sekali mendata bisa sudah bisa macam-macam data sesuai kebutuhan bisa buku bank, buku pajak, spp, dan lainnya”⁸⁷

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Maskur Arifin Selaku Kasi Pengelolaan Keuangan Desa DPMD, Pada hari Jumat, 11 Juni 2021, Pukul 10.30 WIB

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Lilatul As'adah Selaku Operator Desa Pojok, Pada hari Jumat, 11 Juni 2021, Pukul 09.00 WIB

⁸⁷ Hasil Wawancaradengan Bapak Sunarto Selaku Bendahara Desa Pojok, Pada hari Jumat, 11 Juni 2021, Pukul 09.00 WIB

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa ada perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya aplikasi siskeudes di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Perbedaan yang sangat terlihat adalah dengan adanya aplikasi tersebut sistem laporan keuangan desa menjadi lebih mudah dengan sekali mendata semua kebutuhan yang diinginkan sudah tersedia dalam aplikasi tersebut.

Dengan adanya aplikasi tersebut juga sejalan dengan pertanyaan peneliti selanjutnya terkait dengan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien. Berkaitan dengan demikian Bapak Maskur Arifin menjelaskan bahwa:

Tujuan dari adanya aplikasi tersebut memang untuk menciptakan prinsip-prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien. Salah satunya adalah prinsip yang akuntabel, yang artinya akuntabel itu dapat dipertanggungjawabkan mulai dari yang direncanakan, dianggarkan, dan dipenata usahakan oleh desa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang di undangkan. Yang menjadi tolak ukur terpenuhi atau tidaknya itu tergantung dari progress desa untuk memenuhi prinsip-prinsip tersebut.⁸⁸

Hal demikian juga disampaikan oleh Ibu Laila, ia mengatakan bahwa:

Aplikasi ini sudah sejalan dengan tatanan pemerintahan yakni akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien. Aplikasi ini juga sangat efisien karena mudah dalam pengoperasiannya karena sekali memasukkan data sudah muncul apa yang diinginkan⁸⁹

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Maskur Arifin Selaku Kasi Pengelolaan Keuangan Desa DPMD, Pada hari Jumat, 11 Juni 2021, Pukul 10.30 WIB

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Lilatul As'adah Selaku Operator Desa Pojok, Pada hari Jumat, 11 Juni 2021, Pukul 09.00 WIB

Sebagaimana yang disampaikan Ibu Laila, hal demikian juga disampaikan oleh Bapak Sunarto, ia mengatakan bahwa:

Aplikasi ini diciptakan guna mewujudkan pelaporan keuangan yang akuntabel, sehingga aplikasi ini diciptakan supaya dapat dikerjakan seefisien mungkin. Selain itu dengan adanya aplikasi ini dapat dalam tahap pelaporan mulai dari perencanaan sampai pembukuan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.⁹⁰

Untuk kaitanya dengan transparansi, pemerintah Desa Pojok menggunakan papan reklame sebagai sarana untuk pemaparan pelayanan keuangan desa agar masyarakat setempat dapat meninjau tata kelola keuangan desa.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya.

Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik yang telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan telah berlaku efektif tanggal 30 April 2010. Maka, dengan lahirnya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik ini, menjadi sebuah prestasi bangsa dalam rangka mewujudkan demokrasi bangsa, dimana

⁹⁰ Hasil Wawancaradengan Bapak Sunarto Selaku Bendahara Desa Pojok, Pada hari Jumat, 11 Juni 2021, Pukul 09.00 WIB

salah satu ciri kehidupan demokrasi adalah keterbukaan. Dan keterbukaan informasi publik tersebut mempunyai makna yang luas, karena semua pelayanan badan-badan publik harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Seperti yang sudah peneliti paparkan diatas bahwa dalam upaya memudahkan pemerintah desa melaporkan keuangan desa, pemerintah membuat aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) yang ditujukan untuk memudahkan kinerja aparat desa dan mendukung azaz pelayanan keuangan desa yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Ketiga azaz tersebut adalah landasan pemerintah untuk membuat aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Selain sebagai akar berdirinya siskeudes, ketiga azaz tersebut adalah hak masyarakat yang harus didapatkan dari pemerintah desa.

Adanya aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) menurut peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 20 tahun 2018 tidak menampik dengan keterlibatan masyarakat. Masyarakat terlibat dalam sistem ini baik secara keterwakilan maupun secara langsung. Contoh keterlibatan masyarakat seperti halnya pada proses perencanaan pembangunan desa. Semua usulan dan aspirasi dari masyarakat ditampung dan kemudian aspirasi yang tertampung akan dijadikan dasar bagi pemerintah desa untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa. Selanjutnya rencana pembangunan jangka menengah desa ini menjadi tolak ukur penyusunan rencana kerja pemerintah desa untuk tiap tahun. Rencana kerja pemerintah ini selanjutnya akan disusun menjadi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES). Masyarakat disini memiliki kewenangan dan kesempatan untuk melihat apakah usulan-usulan perencanaan

pembangunan itu benar-benar masuk kedalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES).

Diterbitkannya aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes), pemerintah desa merasa sangat terbantu dalam pengerjaan pelaporan keuangan desa. Cukup melakukan *login* dengan cara memasukkan *email* dan kata sandi, semua kegiatan yang ingin dikerjakan bisa terlaksana dengan mudah. Adapun kemudahan yang dirasakan pemerintah desa antara lain seperti perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga pelaporan sudah tercover dengan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Adanya aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) yang langsung diawasi oleh pihak terkait menjadikan pelayanan keuangan desa lebih akuntabel dan untuk pelaporan juga lebih mudah karena setiap pemasukan, pengeluaran tercatat dan ketika tidak sesuai akan langsung terlihat.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sunarto selaku Bendahara Desa Pojok:

Aplikasi ini sangat membantu pekerjaan kami dalam pelayanan keuangan desa dan untuk mengontrol tata kelola keuangan desa. Kelebihan yang paling dirasakan pemerintah desa adalah pada fitur pencatatan pengeluaran dan pemasukan dana desa. Apabila catatan tidak sesuai maka akan otomatis tidak dapat di unggah ke pusat. Hal ini berbeda dengan sistem yang sebelumnya apabila ada ketidakcocokan pada data, maka hal ini akan dapat diketahui ketika berkas sudah di kumpulkan ke pusat.⁹¹

Dalam setiap penggunaan suatu media atau aplikasi tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan dalam pengoperasiannya. Seperti halnya aplikasi

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sunarto selaku Bendahara Desa Pojok, Pada hari Jumat, 11 Juni 2021, Pukul 09.00 WIB

siskeudes ini tentu terdapat kelebihan dan kekurangannya seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Maskur Arifin, ia mengatakan bahwa:

Untuk kekurangan dan kelebihan itu kita bisa tanyakan yang mengoperasikan, karena aplikasi siskeudes tidak serta merta dapat dioperasikan oleh sembarang orang. Karena aplikasi yang sekarang dan yang dulu dan sekarang itu berbeda, yang pertama muncul itu versi 104 karena tidak dapat mengakomodir hal-hal baru karena adanya peraturan baru maka siskeudes harus mengikuti peraturan-peraturan tersebut maka dari itu muncul versi terbaru 106, 107, 202, dan sampai sekarang yang terakhir 203. Semua aplikasi tersebut muncul untuk mengikuti peraturan baru yang muncul, maka dari itu kesulitannya adalah yang mengoperasikannya harus belajar dan menyesuaikan diri mengikuti perubahan peraturan dan versi dari aplikasi tersebut.⁹²

Selain pendapat dari Bapak Maskur, hal demikian juga disampaikan oleh Ibu Laila yang mengatakan bahwa:

Kalau kelebihannya itu dalam satu aplikasi tersebut sudah tersedia berbagai macam form sesuai dengan kebutuhan mulai dari perencanaan sampai dengan pembukuan. Sedangkan kalau kelemahannya apabila servernya itu sudah penuh membuat proses pemasukan data maupun kirim berkas itu menjadi lama karena servernya penuh.⁹³

Seperti halnya yang dikatakan oleh Ibu Laila, Bapak Sunarto juga menjelaskan bahwa:

Kelebihan dari dari aplikasi ini saya rasa sangat banyak, salah satunya cukup memasukkan satu data nanti data-data yang diperlukan akan muncul tanpa harus mencari satu persatu mulai dari data perencanaan sampai kwitansi pembayaran, pajak, dan lainnya itu sudah ada dalam aplikasi tersebut. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu kita harus ekstra sabar apabila server sudah penuh, selain itu aplikasi ini tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain karena untuk menjaga kerahasiaannya.

⁹² Hasil Wawancara dengan Bapak Maskur Arifin Selaku Kasi Pengelolaan Keuangan Desa DPMD, Pada hari Jumat, 11 Juni 2021, Pukul 10.30 WIB

⁹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Lilatul As'adah Selaku Operator Desa Pojok, Pada hari Jumat, 11 Juni 2021, Pukul 09.00 WIB

Kemudian aplikasi ini juga tidak bisa di buka dalam dua perangkat sekaligus dalam waktu yang bersamaan.⁹⁴

Adapun kekurangan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) adalah akses aplikasi yang terbatas, hanya dapat diakses oleh satu pengguna atau satu perangkat, jaringan atau sinyal yang harus kuat dan stabil agar aplikasi dapat berjalan lancar tanpa adanya kendala, pengaksesan harus memakai aplikasi VPN. VPN adalah suatu aplikasi pembantu untuk dapat memasuki situs atau *web* yang bersifat rahasia dan tidak dapat diakses jika hanya menggunakan *browser* biasa. Untuk kelebihan aplikasi tersebut adalah mudahnya pengoperasian, semua keperluan untuk pencatatan dan pelaporan keuangan desa sudah ada dalam sistem keuangan desa (Siskeudes) dan membuat pekerjaan pemerintah desa dalam urusan pelaporan dana desa menjadi lebih mudah.

Proses inilah yang dirasakan pemerintah desa terlalu rumit dan jika terjadi kesalahan dalam penulisan data hal itu akan menyebabkan rusaknya hasil dari data pelaporan keuangan. Setelah pemerintah pusat menerbitkan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes), pelayanan keuangan desa menjadi lebih akuntabel atau lebih rapi karena sudah menggunakan sistem yang lebih canggih sehingga jika terdapat kesalahan dalam pemasukan data akan langsung terlihat.

⁹⁴ Hasil Wawancaradengan Bapak Sunarto Selaku Bendahara Desa Pojok, Pada hari Jumat, 11 Juni 2021, Pukul 09.00 WIB

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan temuan data penelitian yang ada dilapangan mengenai “pelayanan keuangan desa”, peneliti mendapatkan temuan berupa:

1. Keterbatasan Akses terhadap Aplikasi Siskeudes

Aplikasi Siskeudes desa Pokok memiliki akses yang terbatas dimana hanya dapat diakses oleh perangkat pemerintahan desa dan pemerintah pusat. Dengan kata lain, masyarakat tidak memiliki akses bahkan untuk melihat-lihat saja. Hal ini disebabkan karena dalam proses operasi aplikasi tersebut diatur agar hanya orang yang memiliki akses akun siskuedes (admin) yang dapat mengaksesnya dengan tujuan untuk mengamankan data-data pelayanan keuangan desa dari penyadapan ataupun kejahatan dunia maya lainnya.

Dengan adanya akses yang dibatasi tersebut serta adanya peraturan mengenai transparansi keuangan, maka pemerintah desa Pojok mencetak laporan keuangan pada papan reklame yang ditempatkan pada balai Desa. Proses pemaparan data transparansi laporan keuangan secara tradisional tersebut terpaksa dilakukan karena belum adanya sistem keamanan laman web yang tinggi, bahkan *url* atau alamat website Siskuedes desa Pojok belum menggunakan *https (secure system)* sehingga sangat rawan diretas ataupun disadap oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

2. Data yang diketahui masyarakat terbatas

Dalam pelaporan keuangan desa, Desa Pojok melampirkan data keuangannya pada papan reklame sebagai sarana untuk masyarakat. jadi jika masyarakat ingin mengetahui perkembangan dana desa mereka harus melihat data yang sudah dipasang pada papan reklame di balaidesa. Belum ada akses secara online untuk dapat melihat alur dana desa. Data pada papan reklame yang dipasang pemerintah desa sebagai sarana transparansi hanya hasil dari perhitungan.

Dalam pelayanan keuangan desa terdapat asas pelayanan yang harus dijalankan yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tata tertib dan disiplin anggaran. Belum adanya akses secara online membuat asas yang sudah disebutkan tadi belum terlaksana.

3. Aplikasi Siskuedes Tidak Memberikan Fasilitas kepada Masyarakat untuk Memberikan Umpan Balik

Dengan dibatasinya akses aplikasi Siskuedes desa Pojok mengurangi interaksi dengan masyarakat. Adanya aplikasi berbasis internet yang mampu menghubungkan atau mengkomunikasikan kedua belah pihak yakni pihak desa dengan masyarakat belum terlaksana dikarenakan pembatasan akses aplikasi tersebut. Oleh karena itu aplikasi Siskuedes belum atau tidak memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk memberikan umpan balik, bahkan masyarakat belum bisa mengakses atau melihat laporan keuangan melalui aplikasi tersebut.

Mengatasi hal tersebut maka pemerintah desa memberikan layanan atau wadah untuk menampung umpan balik masyarakat melalui kotak saran yang diletakkan di balai Desa. Hal tersebut juga didasarkan pada kurangnya partisipasi masyarakat terhadap proses transparansi pelayanan keuangan atau masyarakat cenderung bersifat tak acuh. Dengan demikian pengelola desa memberikan solusi *feedback* dengan memberikan kotak saran di balai desa Pojok untuk menampung aspirasi masyarakat terutama terkait dengan transparansi dana.